

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA
Studi Kasus : Administrasi Pemerintahan Desa Nanga Taman Kecamatan Nanga Taman
Kabupaten Sekadau**

Veronika Risnawati

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : risnawati_veronika@rocketmail.com

Abstrak

Permasalahan yang terjadi adalah sulitnya memperoleh data profil desa, sekretaris desa masih belum menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil, belum ada kantor desa dan surat-surat penyelenggaraan pemerintahan desanya masih belum terformat tertib, benar dan rapi walaupun telah lama dibentuk. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 pada administrasi pemerintahan Desa Nanga Taman Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau belum optimal. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan paradigma kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik studi dokumentasi. Subjek penelitian dipilih dengan purposive dan orang-orang tersebut. Simpulan dari penelitian adalah bahwa faktor-faktor seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi sangat mempengaruhi efektifitas implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 pada administrasi pemerintahan Desa Nanga Taman Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau sehingga tidak optimal. Upaya-upaya seperti peningkatan kualitas aparatur desa, pemberian materi tentang tugas dan fungsi aparat desa, dan peningkatan komunikasi serta transparansi perangkat desa dengan masyarakat sangat dibutuhkan.

Kata Kunci: implementasi, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Abstract

The problem is the village's profile so hard to get, village's secretary still not as a civil servant, there isn't a village office and an administration management still messy. The purpose for this research is to know factors that influence the effectivity of Implementation of Government Rule Number 72 in 2005 in Government Administration of Nanga Taman Village in Nanga Taman District Sekadau Regency still not optimal. This research using descriptive research with qualitative paradigm. The techniques of data collecting using interview technic, observation technic and documentation technic. The conclusion of this research is the factors such as communication, resources, disposition and bureaucracy structure influence effectivity of Implementation of Government Rule Number 72 in 2005 in Government Administration of Nanga Taman Village in Nanga Taman District Sekadau Regency and make it not optimal. The peoples need to do are such as increase the village worker quality, giving a material about task and function of village worker and increase communication also transparency the village worker with peoples.

Keyword : *implementation, communication, resources, disposition and bureaucracy structure.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Desa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 memiliki pengertian kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sendiri melalui aturan tersebut di atas merupakan daerah otonom yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yakni Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang itu yang kemudian menjadikan desa sebagai daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa merupakan salah satu peraturan yang menuntut adanya administrasi pemerintahan desa yang baik. Implementasi PP tersebut menjadi perlu diperhatikan karena jika administrasi pemerintahan desa yang merupakan organisasi terkecil dalam suatu birokrasi pemerintahan maka data yang diperoleh berikutnya pada organisasi selanjutnya akan mengalami kekurangan pada data administrasi pemerintahannya, yang berakibat pada salahnya suatu kebijakan dilaksanakan.

Implementor dari peraturan pemerintah itu adalah mereka yang memiliki hubungan langsung dengan peraturan pemerintah tersebut seperti kepala desa dan perangkat desa. Tujuan dari PP Nomor 72 Tahun 2005 ini sendiri adalah pemberian kewenangan kepada untuk melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri tanpa menghilangkan ciri dari desa tersebut.

Sebagai akibat dari penyelenggaraan pemerintahan secara otonom (mandiri) yang dilaksanakan oleh Desa yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, maka desa harus melaksanakan administrasi pemerintahan desa. Administrasi pemerintahan desa sendiri memiliki banyak hal yang mempengaruhi dalam penyelenggaraannya. Ini berkaitan dengan yang diungkapkan oleh George Edward III (1980:1) dikutip dalam Nugroho (2011:636) bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Dengan demikian, implementasi PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa dalam kaitannya dengan administrasi pemerintahan desa memiliki hubungan yang sangat erat.

Administrasi pemerintahan desa sangat penting. Dikutip dalam Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Nurcholis, 2011: 133) sistem administrasi yang benar, rapi, dan tertib akan memberikan data dan informasi yang mudah dan sistematis yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan, pembuatan rencana, kontrol kegiatan, evaluasi, dan komunikasi dan informasi baik ke dalam maupun keluar organisasi. Administrasi dalam pemerintahan desa sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuannya

Veronika Risnawati

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

meningkatkan kesejahteraan melalui usaha yang mandiri sehingga dibutuhkan administrasi benar, rapi, dan tertib agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami kendala.

Pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintah Desa dalam peraturan yang sama adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dikutip dalam Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa (Saparin, 1986:48) Administrasi Pemerintahan Desa ialah semua kegiatan yang bersumber pada wewenang Pemerintah Desa yang terdiri atas tugas-tugas kewajiban, tanggung jawab dan hubungan-hubungan kerja, yang dilaksanakan dengan berlandaskan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku, guna menjalankan pemerintahan desa. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa segala kegiatan yang dilakukan pemerintah desa sesuai dengan berdasarkan aturan yang berlaku adalah semua administrasi pemerintahan desa.

Berdasarkan monografi Kecamatan Nanga Taman tahun 2012, Desa Nanga Taman Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau merupakan desa yang ada di Kecamatan Nanga Taman. Desa Nanga Taman merupakan desa pertama yang dibentuk di Kecamatan Nanga Taman. Kecamatan Nanga Taman terdiri dari 13 desa, yaitu Desa Nanga Taman, Desa Rirang Jati, Desa Meragun, Desa Nanga Kiungkang, Desa Lubuk Tajau, Desa

Pantok, Desa Sungai Lawak, Desa Senangak, Desa Tapang Tingang, Desa Nanga Mongko, Desa Nanga Koman, Desa Nanga Engkulun, dan Desa Nanga Mentuka.

Administrasi pemerintahan desa merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan karena hal ini berkaitan dengan perkembangan dan peningkatan pembangunan desa yang berkesinambungan. Dalam pelaksanaannya implementasi PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa khususnya administrasi pemerintahan Desa Nanga Taman masih mengalami kendala seperti sulitnya memperoleh data profil desa, sekretaris desa masih belum menjabat sebagai Pegawai negeri Sipil, belum ada kantor desa dan surat-surat penyelenggaraan pemerintahan desanya masih belum terformat tertib, benar dan rapi walaupun telah lama dibentuk. Seharusnya permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi mengingat bahwa Desa Nanga Taman merupakan desa yang terletak di pusat kecamatan. Dengan letak yang dekat dengan kecamatan tentunya mudah untuk berkonsultasi dengan pihak kecamatan jika mengalami masalah dalam proses penyelenggaraan urusan pemerintahannya. Selain itu, desa ini juga merupakan desa yang pertama kali dibentuk di kecamatan tersebut sehingga Desa Nanga Taman ini harus mampu menjadi contoh bagi desa lain, dapat dibayangkan jika desa berada di pusat kecamatan mengalami kendala demikian bagaimana dengan desa yang letaknya jauh dari kecamatan. Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang disebutkan itu implementasi dari PP Nomor 72 Tahun 2005 dapat dikatakan belum efektif. Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi di Desa Nanga Taman layak untuk diteliti, inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut.

2. Rumusan Permasalahan

Rumusan masalah penelitian ini adalah :
Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa dalam penyelesaian administrasi pemerintahan di Desa Nanga Taman.

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 pada administrasi pemerintahan Desa Nanga Taman Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau belum optimal.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan sosial terutama ilmu pemerintahan mengenai teori Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi yang terjadi di lapangan belum optimal meskipun dalam penelitian yang dilakukan tidak ditemukan faktor-faktor lain selain empat faktor tersebut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi kepada Desa Nanga Taman Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau terutama mengenai tujuan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yakni menciptakan urusan pemerintahan yang efektif terutama dalam kaitannya dengan administrasi

pemerintahan desa tanpa menghilangkan ciri dari Desa Nanga Taman.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka Teori

Menurut Masri Singarimbun & Sofyan Effendi (1995:37) dikutip dalam Pasolong (2012:118), teori adalah serangkaian asumsi, proposisi, konstruk, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Berdasarkan pengertian tersebut maka teori dalam penelitian digunakan sebagai pisau analisis. Berikut adalah teori-teori yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya.

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) sebagaimana dikutip oleh Nugroho (2011:629) menyatakan bahwa:
Implementation is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executives orders or court decision. Ideally, that decision identifies the problem (s) to be addressed, stipulates the objective (s) to be pursued, and, in a variety of ways, 'structures' the the implementation process." (dikutip deLeon & deLeon, 2001, 437).

Berdasarkan pandangan tersebut dapat dikatakan usaha-usaha administrasi merupakan kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang muncul dari adanya suatu perumusan program yang merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan.

George Edward III (1980:1) dikutip dalam Nugroho (2011:636) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, *without effective implementation the decision of*

polymakers will not be carried out successfully. Berarti bahwa administrasi publik memiliki hubungan yang erat dengan implementasi. Edward menyarankan untuk memperhatikan isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu *communication, resource, disposition or attitudes*, dan *bureaucratic structures*.

a. Komunikasi (*Communication*)

Dalam komunikasi terdapat tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu komunikasi, pesan yang disampaikan, dan mereka yang menerima pesan. Dikutip dalam Tangkilisan (2003:12) bahwa komando untuk mengimplementasi kebijakan mesti ditransmisikan kepada personalia yang tepat, dan kebijakan ini mesti jelas, akurat, dan konsisten. Pada implementasi jika pesan yang disampaikan oleh komunikasi dengan jelas, akurat, dan konsisten maka seharusnya implementor yang menjadi pelaksana tidak akan mengalami kendala dalam melaksanakan apa yang diimplementasikan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Subarsono (2009:90) yang menyatakan bahwa:

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Sedangkan dalam Nugroho (2011:636) komunikasi berkenaan dengan:

- 1) Bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik.
- 2) Ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan.

- 3) Sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat.
- 4) Bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan maka dibutuhkan banyak syarat seperti yang disebutkan.

b. Sumberdaya (*Resource*)

Dalam Nugroho (2011:636) dikatakan bahwa resources berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.

Tangkilisan (2003:12) mengemukakan bahwa sumberdaya yang penting meliputi:

- 1) Staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan.
- 2) Informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi.
- 3) Kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan.
- 4) Berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan prrsediaan) di dalamnya atau dengannya harus memberikan pelayanan.

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa dalam implementasi sumberdaya memegang peranan penting. Tanpa sumberdaya komunikasi tidak akan efektif.

c. Disposisi (*Disposition or Attitudes*)

Disposisi berkenaan dengan ketersediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan tersebut, kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan

kebijakan tersebut, hal ini diungkapkan dalam Nugroho (2009:63). Kesiapan dan komitmen berkaitan erat dengan kepatuhan kepada pimpinan. Bagaimana seorang bawahan menghargai dan mematuhi apa yang diperintahkan oleh pimpinannya.

Dalam Subarsono (2011:91) disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Kegagalan-kegagalan yang dialami oleh Negara Indonesia yang paling mendasar disebabkan oleh ketidakpatuhannya bawahan terhadap pimpinan. Implementasi tidak akan berjalan dengan baik jika terdapat tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang dilaksanakan oleh pegawai. Komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis merupakan perilaku yang tidak dapat diukur dengan kasat mata karena berkaitan dengan perasaan manusia.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structures*)

Dikutip dalam Nugroho (2011:636) diungkapkan bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

Fragmentasi organisasional (*bureaucratic fragmentation*) dalam Tangkilisan (2003:13-14) merintangi koordinasi yang perlu untuk

mengimplementasikan dengan sukses sebuah kebijakan kompleks yang mensyaratkan kerjasama banyak orang, dan mungkin juga memboroskan sumberdaya langka, merintangi perubahan, menciptakan kekacauan, mengarah kepada kebijakan bekerja dalam lintas-tujuan, dan menghasilkan fungsi-fungsi penting yang terabaikan.

Prosedur pengoperasian standar (*standard operating procedures* atau *SOP*) merupakan pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. SOP sendiri muncul sebagai usaha dalam menghindari *bureaucratic fragmentation*. Struktur birokrasi yang panjang dan rumit mengakibatkan sulitnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan.

Berdasarkan penjelasan model implementasi kebijakan maka peneliti memilih model tersebut karena sederhana dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 pada administrasi pemerintahan Desa Nanga Taman Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau yang mana *communication*, *resource*, *disposition* or *attitudes*, dan *bureaucratic structures* digunakan oleh peneliti sebagai indikator dalam melakukan penelitian di lapangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang Desa. Terdapat empat prinsip dasar di dalamnya yaitu, keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, dan demokratisasi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 terdiri dari XII Bab sebagai berikut:

- a. Bab I tentang Ketentuan Umum;
- b. Bab II tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa;
- c. Bab III tentang Kewenangan Desa;
- d. Bab IV tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. Bab V tentang Peraturan Desa;
- f. Bab VI tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- g. Bab VII tentang Keuangan Desa;
- h. Bab VIII tentang Kerja Sama Desa;
- i. Bab IX tentang Lembaga Kemasyarakatan;
- j. Bab X tentang Pembinaan dan Pengawasan;
- k. Bab XI tentang Ketentuan Peralihan; dan
- l. Bab XII tentang Ketentuan Penutup.

Herbert A.Simon (1999:3) dikutip dalam Syafei (2008:3) mendefinisikan *administration can be defined as the activities of groups cooperating to accomplish common goals*. Sedangkan Leonard D. White dikutip dalam Syafei (2008:4) mendefinisikan *administration can be defined as the activities of groups efforts, public or private, civil or military*. Pasolong (2012:50) menyatakan bahwa: "Administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh suatu kelompok dalam hal ini pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan paradigma kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan situasi tertentu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi yang

berlangsung di Desa Nanga Taman Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau khususnya Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dengan menggunakan narasi yang datanya diperoleh dengan teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik studi dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Pemerintah Kabupaten Sekadau, camat Nanga Taman, Sekretaris Kecamatan Nanga Taman, Kasi Pemerintahan Kecamatan Nanga Taman, Kepala Desa Nanga Taman, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan Desa, Kaur Pembangunan Desa, Kaur Umum, 2 Kepala Dusun, 3 Ketua RT, 1 Tumenggung/ pemangku adat dan masyarakat setempat. Instrumen dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut "analisis". Teknik keabsahan data adalah triangulasi sumber yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini menggunakan minimal tiga sumber dalam menguji kredibilitas data. Selain triangulasi sumber, peneliti juga menggunakan saturasi data atau kejenuhan data.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Permasalahan yang akan dibahas pada subbagian ini adalah proses implementasi PP No.72 Tahun 2005 tentang desa sehingga pada penelitian di lapangan teori Edward III digunakan oleh penulis sebagai pisau analisis untuk mengukur seberapa efektifitasnya implementasi peraturan pemerintah tersebut. Desa Nanga Taman pada implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 khususnya administrasi pemerintahan desanya akan dideskripsikan menggunakan empat indikator sesuai dengan teori yang digunakan tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa pada administrasi pemerintahan Desa Nanga Taman tidak optimal dibuktikan dengan sulitnya memperoleh data profil desa yang akurat, sekretaris desa belum menjabat sebagai pegawai negeri sipil, belum tersedianya kantor desa, dan surat-menyurat penyelenggaraan pemerintahan desanya masih belum tertib, benar dan rapi walaupun desa telah cukup lama terbentuk.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tersebut dapat dikatakan optimal apabila empat indikator itu telah terpenuhi. Teori Edward III yang digunakan oleh penulis didasarkan pada bagian-bagian yang lebih kecil lagi.

Pada subbagian pembahasan ini akan dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 khususnya pada administrasi pemerintahan Desa Nanga Taman sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti di lapangan. Kualitas dan kuantitas komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi yang dikaji lebih spesifik lagi menggunakan komponen-komponen yang ada, pada setiap lembaga pemerintahan dalam mempengaruhi implementasi

berbeda-beda, ada yang dominan dan tidak dominan, ada yang sama, dan ada juga yang tidak sama. Faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan empat indikator yang digunakan secara keseluruhan memiliki andil dan proporsi yang berbeda-beda. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan studi dokumentasi penjelasan secara spesifik hasil penelitian tersebut dikemukakan sebagai berikut.

a. Analisis Komunikasi

Empat indikator yang digunakan yakni komunikasi (*communication*), sumberdaya (*resource*), disposisi (*disposition or attitudes*), dan Struktur birokrasi (*bureaucratic structures*) memiliki proporsi yang berbeda-beda dalam pengaruhnya terhadap efektifitasnya implementasi PP No.72 Tahun 2005. Masing-masing komponen dari tiap indikator ada yang sudah terlaksana ada yang belum. Misalnya komunikasi, pertemuan-pertemuan mengenai implementasi peraturan pemerintah tersebut narasumber yang menyampaikan pembahasan sesuai dengan profesi mereka namun pada komponen komunikasi lainnya seperti ketersediaan peralatan dalam menunjang komunikasi di desa kurang, laptop saja hanya satu yang dimiliki oleh sekretaris desa.

b. Analisis Sumberdaya

Sumberdaya Desa Nanga Taman sangat terbatas dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan implementasi. Peralatan yang mendukung misalnya alat-alat yang digunakan dalam sosialisasi seperti komputer (laptop). Berbeda dengan kantor desa yang masih menumpang, gedung pertemuan desa telah dimiliki ini.

c. Analisis Disposisi

Disposisi merupakan sikap kepatuhan bawahan terhadap pimpinan ialah salah satu

perilaku yang menentukan apakah implementasi dari sebuah peraturan dapat berjalan dengan baik. Perangkat Desa Nanga Taman memiliki pemimpin yang masih belum mampu membawa administrasi pemerintahan desa ke arah yang lebih baik karena ada kegiatan-kegiatan yang masih belum transparan dalam pelaksanaannya. Sikap tidak transparan tersebut mengakibatkan para perangkat desa menjadi tidak terlalu peduli dengan perkembangan PP No. 72 Tahun 2005.

d. Analisis Struktur Organisasi

Pada Desa Nanga Taman tugas dan fungsi tertumpuk pada sekretaris desa. Struktur birokrasi seolah-olah menjadi samar karena pemusatan tugas pada sekretaris desa tersebut. Sedangkan pada Pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Pemerintah Desa Kabupaten Sekadau dan Kecamatan Nanga Taman dalam implementasi PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa memiliki peran sebagai pembina dan pengawas. Tugas sebagai pembina mereka laksanakan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan implementasi peraturan pemerintah tersebut. Pihak kecamatan telah melakukan sosialisasi berupa pemberian fotokopian peraturan itu. Terlihat bahwa tugas dan fungsi dua organisasi tersebut sudah baik.

2. Keterbatasan Studi

Usaha yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian di lapangan meskipun sudah optimal tidak akan terlepas dari kekurangan-kekurangan. Kekurangan-kekurangan tersebut seperti ketidakmampuan penulis dalam menganalisis secara tajam, keterbatasan dalam melakukan wawancara, dan kurangnya pemenuhan serta analisis data yang penulis lakukan di lapangan.

Pengalaman penulis yang kurang merupakan kelemahan yang paling mendasar yang mengakibatkan terjadinya kekurangan-kekurangan tersebut. Berikut dijelaskan beberapa kesulitan yang dialami oleh penulis.

Kurangnya keterbukaan kepala desa terhadap dalam kepemimpinan yang dimilikinya menunjukkan sikap yang otoriter terutama dalam hal keuangan. Hampir semua tugas tertumpuk pada sekretaris desa sehingga yang mengetahui tugas-tugas yang ada di kantor desa hanya sekdes saja sedangkan aparatur lain tidak mengetahui apa-apa, akibatnya ketika ditanyakan keadaan kantor desa kepada aparat desa mereka mengatakan untuk bertanya saja pada sekdes banyak juga yang menyampaikan keluhan-keluhan lain selain permasalahan peneliti yang disampaikan.

Tuntutan hidup membuat setiap orang mencari pekerjaan untuk mempertahankan hidupnya. Gaji yang diperoleh dari jabatan hanya sebagai ketua RT tentu tidak akan mencukupi untuk kehidupan mereka sehari-hari. Namun pekerjaan yang mereka peroleh menuntut mereka untuk bekerja di pagi sampai sore hari dan ada yang harus bekerja di luar wilayah kecamatan sehingga sulit untuk ditemui. Dengan demikian, kuantitas bertemu para aparat desa minim waktu yang bisa dimanfaatkan hanya malam hari sedangkan waktu malam hari pun terbatas (tidak boleh terlalu malam) karena merupakan jam istirahat. Selain itu, ketika penulis melakukan penelitian di lapangan bertepatan dengan diadakannya kegiatan pekan olahraga oleh pihak kecamatan, banyak masyarakat memilih untuk mendirikan warung-warung kecil untuk berjualan makanan, mainan, dan sebagainya. Salah satu dari mereka merupakan aparat desa sehingga dengan kesibukannya bekerja intensitas bertemu pun sedikit.

Desa merupakan wilayah yang dibentuk dengan mempertahankan tradisi dan budaya yang ada, tetapi ada kesulitan tersendiri yang dialami penulis, yakni ketika nama yang digunakan oleh para subjek penelitian atau nama asli mereka tidak sama dengan nama panggilan mereka sehari-hari, misalnya nama aslinya Swandi nama panggilannya Lapok. Dan kesulitan tersebut terasa lebih berat ketika masyarakat di desa hanya mengetahui nama panggilan saja sedangkan data yang diperoleh penulis dari kantor desa hanya nama lengkap aparat desa tersebut.

3. Apresiasi

Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintah Desa (Kesbang), Pemerintah Kecamatan Nanga Taman, Pemerintah Desa Nanga Taman, dan masyarakat Desa Nanga Taman yang telah memberikan izin dan bantuan kepada saya dalam melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahab, Splichin. 2005. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anonimos. 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan*. Pontianak: Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-*
- Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Saparin. 1979. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Chalia Indonesia.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2008. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: P Bumi Aksara.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset
- Tohardi, Ahmad. 2010. *Diktat Kuliah Metodologi Penelitian Sosial*. Pontianak.
- Tohardi, Ahmad. 2012. *Diktat Kuliah Metodologi Penelitian Sosial*. Pontianak.
- Wibawa, Samodra. 2009. *Administrasi Negara: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widjaja, HAW. 2001. *Pemerintahan Desa/Marga: Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, A.W. 1993. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-*

Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Permendagri No. 47 Tahun 2002 tentang Pedoman Administrasi Desa.

C. Monografi

Profil Desa Nanga Taman Tahun 2012.

Monografi Kecamatan Nanga Taman Tahun 2012.

D. Tesis

Hatta (2003). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa di Kabupaten

Sintang. Tesis. Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak. Pontianak.

Ulidal Muhtar (2010). Penataan Organisasi dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang. Tesis. Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak. Pontianak.

E. Rujukan Elektronik

Ferdinand BT, (tt), *Pedoman Observasi*, Melalui: <<http://eprints.uny.ac.id/7720/5/lampiran%20-%20%2007110241010.pdf>> (28/4/2013).

Kuswandi A., (tt), *Pedoman Wawancara*, Melalui: <<http://aos-kuswandi.blogspot.com/2008/12/contoh-pedoman-wawancara.html>>, (28/4/2013).





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : VERONIKA RISNAWATI
NIM / Periode lulus : E42009067/ 2013
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : risnawati_veronika@rocketmail.com / 082155910813

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA
Studi Kasus : Administrasi Pemerintahan Desa Nanga Taman Kecamatan Nanga Taman
Kabupaten Sekadau

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

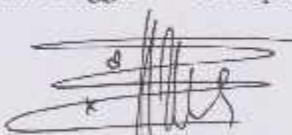
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal IP.....

H. Wijaya Kusuma, MA, Ph.D
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 5 September 2013


(VERONIKA RISNAWATI)

